

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi keberlanjutan masyarakat, tata kelola yang dinamis dikenal menuntut pemerintah untuk memodifikasi setiap program atau kebijakan yang diterapkannya. Selain itu, pemerintah didesak untuk menyempurnakan pola kebijakan publik agar dapat diadopsi oleh semua pihak, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif dan diterapkan secara berkelanjutan. Pembangunan sosial dan ekonomi dipengaruhi oleh sifat dinamis situasi pemerintahan. Lebih lanjut, karena sektor lingkungan sering menghadapi ketidakpastian, perlu dipertimbangkan kebutuhan akan penyempurnaan berkelanjutan di berbagai bidang akibat perubahan cepat dalam perkembangannya (Sari & Rusli, 2022).

Keberhasilan membutuhkan tata kelola yang dinamis, terutama di era teknologi dan globalisasi yang berkembang pesat. Konsep-konsep baru, asumsi-asumsi baru, pengembangan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang cepat, adaptasi yang sangat fleksibel dan dinamis, serta kreativitas yang inovatif dan berfokus pada solusi merupakan ciri-ciri dinamisme ini. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan adaptif dikembangkan untuk dijalankan sesuai dengan kebutuhan lingkungan pemerintahan dan situasi terkini ketika tata kelola dinamis diterapkan Neo & Chen dalam Andhika (2017:91-92).

Agar berbagai kebijakan, lembaga, dan struktur tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang masyarakat, mereka harus

mampu beradaptasi dengan ketidakpastian dan perubahan cepat di lingkungan. Hal ini dikenal sebagai tata kelola yang dinamis.

Berdasarkan konteks saat ini, gagasan tata kelola pemerintahan yang dinamis bagi pemerintahan Indonesia menjelaskan mengapa pemerintah negara ini telah menggunakannya sejak Juli 2019, ketika sejumlah pihak menyarankan agar para pemimpin negara di semua tingkat pemerintahan mulai mempertimbangkan gagasan tersebut. Gagasan ini sudah ada dalam sejumlah struktur pemerintahan nasional dan daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut dalam situasi yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprioritaskan keadaan yang dapat mengurangi konflik. Pola kebijakan adaptif melalui jalur adaptif diprioritaskan ketika merumuskan kebijakan publik. Sebagai pembuat kebijakan, hal ini memungkinkan pemerintah untuk menerapkan elemen "berpikir ke depan, berpikir lintas, dan berpikir ulang" secara komprehensif dan seragam di semua wilayah (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat merupakan salah satu dari delapan bidang utama yang menjadi fokus reformasi birokrasi sebagai pilar krusial penentu kualitas pemerintahan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Pajri, 2018). Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia diperkirakan akan bertransisi menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis sebagai bagian dari proses jangka panjang ini. Lebih lanjut, hal ini

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Secara Dipercepat. Berdasarkan peraturan tersebut, percepatan reformasi birokrasi bertujuan untuk mencapai dua tujuan: mendorong percepatan penerapan reformasi birokrasi yang komprehensif di lingkungan pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, berbasis kinerja, dan dinamis. (Ni Putu Dinda Kalpika Putri & Putri, 2023)

Reformasi birokrasi tentu tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah saja, tetapi juga pada pemerintahan desa (reformasi birokrasi pemerintah desa). Reformasi desa didukung dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengedepankan peran desa secara otonom dengan keunikan hak asal usulnya. Undang-undang tersebut menjadi formulasi baru bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, dengan mendukung dan menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri secara dinamis, baik dalam memberikan pelayanan maupun mengelola potensi desa. Mengingat bahwa desa merupakan entitas pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, pengelolaan potensi desa secara dinamis diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh berjudul *Dynamic Governance dalam Upaya Desa Toapaya Selatan Mewujudkan Desa Mandiri di Tahun Christina dkk yang 2023*. Yang mana dalam penelitian ini menyoroti pentingnya adaptabilitas, inovasi, dan

kolaborasi sebagai komponen utama keberhasilan pembangunan desa menunjukkan bahwa pendekatan Dynamic Governance, yang mengedepankan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir secara sistematis, dan membuat keputusan yang tanggap terhadap perubahan, mampu meningkatkan kapasitas desa (Rika Widianita, 2023)

Menurut penulis Penerapan konsep Dynamic Governance di desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Dimana pemerintah desa mampu berpikir strategis ke depan, melibatkan berbagai perspektif, dan mengevaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Hal ini memungkinkan desa untuk menciptakan inovasi yang relevan dan solutif bagi masyarakat, baik dalam bidang pelayanan publik, maupun peningkatan kesejahteraan. Selain itu, penerapan tata kelola dinamis memungkinkan desa untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, sehingga tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif. Penerapan reformasi birokrasi berbasis dynamic governance di tingkat desa juga mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan. Desa yang menerapkan konsep ini dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, fleksibel, dan inovatif, sehingga mampu menjawab tuntutan masyarakat dengan lebih efektif.

Pada tingkat desa ini Dynamic Governance diterapkan melalui

pendekatan yang lebih sederhana namun tetap strategis. Pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dinamika tata kelola di tingkat ini sangat bergantung pada kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam mendengar aspirasi warga. Pendekatan ini juga melibatkan penguatan kapasitas masyarakat desa agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Desa Wae Ajang adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai, Desa Wae Ajang memiliki jumlah penduduk 1558 jiwa. Komposisi Penduduk dari desa ini terdiri dari kelompok usia produktif, anak-anak, dan lansia.

Desa Wae Ajang dalam menunjang perubahan terkait Tuntutan tata kelola pemerintahan desa yang terus berkembang aparat desa wae ajang menunjukkan adanya kemajuan dengan membuat media sosail seperti facebook dan juga blog desa untuk mempublikasikan profile desa. Selain dari itu Juga untuk nmemberikan informasi terkait hal apa saja yang dilakukan di desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. informasi yang diberikan tidak hanya diketahui oleh warga yang menghadiri pertemuan dalam merancang atau membahas terkait ptoqram tersebut tetapi juga diketahui oleh semua masrakat desa maupun di luar desa.

Desa Wae Ajang mulai terlihat dengan adanya perubahan dalam pelayanan desa. Dari yang belum baik menjadi baik yang mana terlihat dalam transparansi anggaran dan pembangunan desa. Desa Wae Ajang yang

sebelumnya warga tidak tahu penggunaan dana desa dan proyek pembangunan dan juga Tidak ada forum terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat. Namun sejauh ini sudah menampilkan perubahan yang mana Setiap anggaran dan realisasi proyek dipublikasikan melalui papan informasi desa Dapat terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Papan informasi kegiatan Desa Wae Ajang

Perubahan lain juga terlihat dalam kegiatan desa yang mengadakan forum diskusi bagi masyarakat desa Wae Ajang sehingga masyarakat dilibatkan dalam forum – forum diskusi tersebut yang membahas isu-isu penting, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, berbagi ide, serta berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa termasuk anggaran dana desa. Terlihat dengan jelas bahwa sebelum adanya forum diskusi ini masyarakat desa wae ajang sangat terbatas dalam menyampaikan gagasan atau ide dalam mendukung suatu program yang di jalankan. Bentuk nyata forum diskusi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Forum diskusi Desa Wae Ajang

Dalam pelayanan administrasi pemerintah desa Wae Ajang mampu memberikan layanan yang transparan yaitu ditandai dengan layanan sosial yang berupa bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan secara terbuka kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Dalam hal ini pemerintah desa dan aparat desa wae ajang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu keluarga yang kurang mampu. Terlihat dalam penyebaran informasi desa wae ajang menyebarkan informasi penerima bantuan sosial dengan secara terbuka kepada seluruh warga yaitu dengan dipasangkan di kantor desa terkait nama – nama penerima bantuan sosial (BLT) Serta nominal yang diberikan juga tertera secara terbuka. Besar nominal yang diberikan adalah Rp 300,000 ini dilakukan setiap bulan dalam setahun. Terhitung dari bulan januari sampai bulan desember. Dalam proses pelaporannya aparat dan pemerintahan desa wae ajang mampu memberikan laporan resmi secara keseluruhan mulai dari daftar penerima, jenis bantuan , sampai pada proses penyaluran. hal ini tentunya warga dengan mudah mengetahui mengenai jumlah bantuan yang disalurkan. Media yang digunakan

desa wae ajang dalam menyebarkan informasi tersebut yaitu melalui grup whatsapp dan papan pengumuman desa.

Namun hingga saat ini bentuk nyata kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa wae ajang masih belum terlihat secara signifikan. Idealnya, kerja sama ini dapat terwujud melalui berbagai program pembangunan, baik dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi berbasis masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya inisiatif dari masyarakat untuk aktif berkontribusi. Beberapa warga masih memiliki pola pikir bahwa pembangunan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa, tanpa menyadari bahwa peran mereka sangat diperlukan dalam setiap aspek pembangunan. Padahal, jika masyarakat dan pemerintah desa mampu menjalin sinergi yang baik, berbagai permasalahan yang ada di desa dapat diatasi dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu aparat desa Wae Ajang yaitu Bapak Iren mengatakan hal yang sama bahwa “ masyarakat sendiri cenderung merasa bahwa segala yang berkaitan dengan desa akan menjadi tanggung jawab oleh pemerintah desa itu sendiri. Walaupun secara terangan pemerintah desa telah mengadakan forum diskusi sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam mengaspirasikan segala ide – ide mereka namun itu sama saja tidak mejadi jaminan”.

Dari permasalahan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait dynamic governance di Desa Wae Ajang melalui judul : **“PENERAPAN PRINSIP DYNAMIC GOVERNANCE DI DESA WAE AJANG KECAMATAN SATAR MESE KABUPATEN MANGGARAI “**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip dynamic

Governance di Desa Wae Ajang terhadap kebijakan yang dibuat bagi masyarakat. Rumusan masalah yang diidentifikasi adalah:

- 1) Deskripsikan penerapan prinsip Dynamic Governance di Desa Wae Ajang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai

1.3 Tujuan Penulis

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Mendeskripsikan penerapan prinsip Dyanmic Governance di Desa Wae Ajang Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yakni terbuat menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis serta manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah Desa dan masyarakat setempat memahami deskripsi penerapan prinsip dynamic governance di Desa Wae Ajang yang berkontribusi dalam kebijakan tata kelola pemerintahan dinamis di mana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur tentang penerapan prinsip Dynamic Governance, memberikan wawasan baru bagi teori keberlanjutan di daerah konservasi, dan menjadi acuan penelitian lanjutan di kawasan serupa.